

Aktualisasi Sila Ke-5 Pancasila untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia

Geni Aufana Olfiyani ^{a,1}, Fatma Ulfatun Najicha ^{b,2}

^a Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

^b Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

¹ geniaufanaolfiyani@student.uns.ac.id*

² fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

*korespondensi penulis

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan suatu fenomena di mana seseorang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak faktor penyebab kemiskinan, di antaranya perbedaan kualitas sumber daya manusia yang ada, perbedaan akses terhadap berbagai fasilitas kehidupan, adanya bencana seperti wabah penyakit, bencana alam, dan sebagainya. Adapun bentuk penyelesaian dari kasus kemiskinan yaitu menerapkan serta mengimplementasikan nilai-nilai yang ada pada sila-sila Pancasila, khususnya sila kelima Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu proses mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai data, fakta, teori, dan konsep. Objek yang menjadi dasar dalam penulisan artikel ini yaitu masyarakat Indonesia, khususnya yang masih mengalami kemiskinan. Penulis memilih objek dalam kajian ini karena penulis ingin memberikan kesadaran kepada seluruh pihak bahwa masyarakat Indonesia perlu mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak.

ABSTRACT

Poverty is a phenomenon in which a person is deficient in meeting his life needs. There are many factors that cause poverty, including differences in the quality of existing human resources, differences in access to various life facilities, disasters such as disease outbreaks, natural disasters, and so on. The form of settlement of poverty cases is implementing and implementing the values contained in the Pancasila precepts, especially the fifth Pancasila precept. This research uses a descriptive approach method, namely library research. Literature study is a process of studying and analyzing more deeply about data, facts, theories, and concepts. The object that forms the basis for writing this article is the Indonesian people, especially those who are still experiencing poverty. The author chose the object in this study because the author wants to raise awareness to all parties that Indonesian people need to get proper welfare and livelihood.

Informasi Artikel

Diterima : 20 Desember 2022

Disetujui : 28 Januari 2023

Kata kunci:

Kemiskinan, Pancasila, Kesejahteraan

Article's Information

Received: 20 December 2022

Accepted: 28 January 2023

Keywords:

Poverty, Pancasila, Welfare

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Indonesia kurang lebih 275.361.267 jiwa pada tanggal 30 Juni 2022. Banyaknya jumlah penduduk tersebut tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi Indonesia karena Indonesia mampu menempati urutan keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Penduduk dengan jumlah yang tinggi di suatu wilayah juga mampu menjadi modal bagi pembangunan di Indonesia dalam segala bidang kehidupan (Purnamasari, 2016). Selain itu, masih banyak lagi keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia berkaitan dengan banyaknya jumlah penduduk. Banyaknya penduduk juga berarti bahwa negara Indonesia memiliki tingkat kesehatan yang tinggi, terbukti dengan banyaknya kelahiran yang terjadi dan angka harapan hidup yang tinggi.

Penduduk juga mampu memberikan masalah bagi suatu negara. Salah satu permasalahan yang terjadi terkait kependudukan adalah kasus kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius di seluruh negara di penjuru dunia, termasuk di Indonesia yang merupakan negara berkembang (Ningrum, 2017). Kasus kemiskinan di Indonesia umumnya disebabkan karena jumlah penduduk yang semakin banyak, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia khususnya mereka yang berada di wilayah pinggiran (jauh dari perkotaan) mengalami peningkatan jumlah pengangguran. Meningkatnya jumlah pengangguran ini merupakan salah satu penyebab munculnya kasus kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator tidak tercapainya tujuan bangsa Indonesia yang terdapat dalam sila kelima pancasila, yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dalam sila kelima ini tidak tercapai karena adanya suatu ketimpangan terhadap sila kelima, seperti ketimpangan pemerataan kesejahteraan dan distribusi kekayaan. Cerminan kondisi masyarakat yang tinggal di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh faktor kemiskinan (Christianto, 2013). Peran pancasila dalam hal ini sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Aktualisasi nilai dalam sila kelima pancasila harus benar-benar diterapkan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia demi terciptanya masyarakat yang damai dan sejahtera.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan cara pendekatan deskriptif, yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu proses mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai data, fakta, teori, dan konsep. Sumber referensi yang digunakan yaitu *E-book*, jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang masih berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis. Adapun objek yang menjadi dasar dalam penulisan artikel ini yaitu masyarakat Indonesia, khususnya yang masih mengalami kemiskinan. Penulis memilih objek dalam kajian ini karena penulis ingin memberikan kesadaran kepada seluruh pihak bahwa masyarakat Indonesia perlu mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera, sebab pada dasarnya semua manusia memiliki hak yang sama di mata undang-undang dasar.

Hasil dan Pembahasan

Berbicara mengenai kependudukan di Indonesia, pasti tidak akan jauh dengan istilah kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi seseorang di mana ia tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti standar minimum kebutuhan pokoknya yang diakibatkan karena belum/tidak mempunyai pekerjaan yang layak (Chaniago, 2015). Kemiskinan ini merupakan permasalahan yang serius di negara Indonesia apabila tidak ditangani dengan serius. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kasus kemiskinan di Indonesia, tetapi usaha tersebut belum dapat meredam peningkatan/kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Kasus kemiskinan yang ada di negara berkembang, khususnya di Indonesia seringkali dikaitkan dengan bidang ekonomi. Padahal, banyak faktor lain yang dapat menimbulkan kemiskinan di Indonesia seperti bidang sosial, budaya, pendidikan, dan masih banyak lagi. Menurut Itang (2015), kemiskinan dalam kaitannya dengan bidang ekonomi memiliki arti bahwa adanya kekurangan sumber daya yang dimiliki suatu keluarga dalam peningkatan kesejahteraan baik finansial maupun jenis kekayaan. Kemiskinan ini merupakan suatu masalah yang kompleks dan multidimensional.

Terjadinya kasus kemiskinan di Indonesia tentunya memiliki faktor penyebab. Kemiskinan dapat terjadi karena perbedaan kualitas sumber daya manusia yang ada, perbedaan akses terhadap berbagai fasilitas kehidupan, adanya bencana seperti wabah penyakit, bencana alam, dan sebagainya. Ketiga faktor penyebab kemiskinan tersebut merupakan faktor secara umum yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Namun, selain faktor-faktor tersebut juga masih ada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan munculnya kasus kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan yang pertama yaitu

perbedaan kualitas sumber daya manusia. Salah satu hal utama yang menyebabkan munculnya kasus kemiskinan di Indonesia yakni kurangnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam usaha produktivitas dalam kehidupan sehari-hari (Maulida & Sari, 2015). Namun, yang menjadi permasalahan saat ini yaitu kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih tergolong kurang berkompeten.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Kenyataan di lapangan telah membuktikan bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia salah satu akibat dari kurangnya masyarakat Indonesia dalam memperoleh pendidikan (Retno, 2013). Banyak dari masyarakat di Indonesia juga kesadaran akan pendidikannya terbilang masih sangat minim. Padahal, pendidikanlah yang nantinya akan menjadikan kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Melalui pendidikan, seseorang akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang nantinya akan menambah wawasan dan pengetahuan. Pengetahuan dan wawasan tersebut akan dapat diaplikasikan di berbagai lingkungan kehidupan seperti lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan pekerjaan, bahkan bangsa dan negara.

Randahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat akan menjadikan sumber daya manusianya menjadi rendah. Hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam dunia usaha/pekerjaan. Dunia pekerjaan sudah pasti membutuhkan sumber daya yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing unggul. Masyarakat yang kurang berkompeten tentunya akan menjadi pertimbangan yang sangat matang bagi sebuah perusahaan atau dunia usaha yang akan menerima calon pegawai. Tentunya mereka memilih seseorang yang memang benar-benar memiliki kualitas yang unggul dan dinilai mampu mengembangkan usaha yang sedang ia jalankan. Dengan demikian, orang yang tidak memiliki kompetensi dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan memiliki kesempatan yang kecil untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang tinggi. Oleh karena itu, sering kita temukan bahwa orang yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak karena rendahnya tingkat pendidikan hidupnya biasanya kekurangan.

Faktor penyebab kemiskinan yang kedua yaitu perbedaan akses terhadap berbagai fasilitas kehidupan. Salah satu contoh perbedaan dalam hal akses terhadap fasilitas kehidupan yaitu akses transportasi. Masyarakat yang berada jauh dari perkotaan (di pinggiran kota) atau bahkan di pelosok masih mengalami kesulitan dalam hal akses terhadap transportasi. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab kemiskinan karena akses terhadap dunia luar menjadi terhambat. Mereka akhirnya hanya mendapatkan apa yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal. Kebutuhan yang ada di sekitarnya saat itu, itulah yang akan menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Terkadang, dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, banyak masyarakat di pelosok wilayah Indonesia yang masih merasa kelaparan. Bahkan, banyak di antara mereka yang hanya memakan apa yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Fasilitas yang menjadi penentu angka kemiskinan di Indonesia yaitu fasilitas pengajaran dan pendidikan. Masih banyak wilayah di Indonesia, khususnya wilayah pelosok yang masih kesulitan dalam mendapatkan fasilitas pendidikan dan pengajaran. Infrastruktur yang belum memadai baik dari segi kuantitas dan kualitasnya merupakan salah satu penyebab sulitnya masyarakat desa dalam mendapatkan fasilitas pendidikan (Gewab et al., 2015). Berbeda dengan masyarakat perkotaan yang segala fasilitasnya dapat dikatakan sudah terjamin karena mudah dijangkau oleh pemerintah, masyarakat pedesaan khususnya yang berada di pelosok masih merasakan kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Selain fasilitas transportasi dan pendidikan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah fasilitas tempat tinggal. Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Namun, ternyata masih banyak rumah tangga di pelosok pedesaan di wilayah Indonesia yang mempunyai rumah kurang/tidak layak huni. Rumah yang tidak layak huni dapat diartikan sebagai rumah yang tidak

memenuhi persyaratan hunian (Sugihartono, 2018). Hal tersebut karena masyarakat di pelosok desa kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah sebab wilayah pelosok jauh dari wilayah pemerintahan, sehingga pemerintah kurang mengontrol kondisi dan keadaan masyarakat yang ada di pelosok pedesaan.

Faktor ketiga yang menyebabkan munculnya kasus kemiskinan adalah wabah penyakit. Dua tahun terakhir ini, Indonesia sedang mengalami masa pandemi covid-19. Tahun 2020 menjadi tahun di mana perekonomian negara Indonesia lumpuh total akibat wabah penyakit covid-19 (Setyadi & Indriyani, 2021). Hal tersebut menyebabkan peningkatan kemiskinan di Indonesia. Berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia akibat pandemi covid-19 menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian sehingga angka kemiskinan menjadi meningkat. Selama masa pandemi covid-19, seluruh kegiatan masyarakat menjadi terbatas. Kegiatan interaksi dengan orang lain juga sangat terbatas. Berbagai keterbatasan tersebut menjadikan aktivitas dan kegiatan perekonomian menjadi menurun sehingga banyak masyarakat yang terpaksa harus kehilangan pekerjaannya.

Bencana alam juga merupakan faktor munculnya kemiskinan di Indonesia. Kasus kemiskinan sangat dirasakan oleh mereka yang dekat dengan garis kemiskinan dan kekurangan sumber daya untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidupnya (Desinta & Sitorus, 2021). Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Indonesia terletak di antara empat lempeng tektonik sehingga menyebabkan Indonesia berpotensi tinggi terjadinya bencana alam. Bencana yang sering terjadi misalnya banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Adanya bencana alam tersebut membuat berbagai fasilitas kehidupan mencari rusak. Bangunan-bangunan, gedung, rumah, dan berbagai fasilitas lainnya akan hancur apabila terjadi bencana alam yang dahsyat seperti tsunami Aceh pada tahun 2004. Hal tersebut yang menjadikan negara Indonesia menjadi bertambah jumlah penduduk miskinnya.

Kasus kemiskinan di Indonesia tentunya memberikan sejumlah dampak yang serius dalam berbagai lingkungan kehidupan, baik keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Dampak dalam lingkungan keluarga contohnya seperti kelaparan dan kekurangan gizi serta kesulitan dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak. Mereka yang menderita kelaparan adalah mereka yang tidak terlihat karena terisolasi (jauh dari cakupan pemerintahan) sehingga kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah (Darubekti, 2021). Kelaparan juga dapat disebabkan karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan akan pangan.

Dampak kemiskinan dalam lingkungan masyarakat contohnya meningkatnya tindak kriminalitas. Kriminalitas merupakan suatu bentuk perilaku/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bersifat mengancam atau membahayakan keselamatan orang lain (Dulkiah, 2018). Kemiskinan sangat erat dengan tindakan kriminalitas. Secara umum, tindak kriminalitas disebabkan karena seseorang merasa sudah tidak ada jalan lain sehingga ia melakukan tindak kriminal demi memenuhi tuntutan hidup yang semakin banyak dan berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, sebenarnya kasus kriminalitas yang terjadi karena kemiskinan sebagian besar disebabkan karena keterpaksaan akan pemenuhan tuntutan hidup agar mendapatkan kesejahteraan.

Kriminalitas dinilai mampu memberikan dampak buruk terhadap masyarakat. Salah satu dampak buruk akibat kriminalitas yaitu rasa tidak aman. Adanya tindak kriminalitas menyebabkan masyarakat menjadi merasa tidak aman. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika menjalankan kegiatan sehari-hari, banyak masyarakat merasa tidak aman terutama pada saat melakukan kegiatan di wilayah yang rentan terhadap tindak kriminalitas (Fitriani, 2022). Selain itu, berbagai kegiatan kemasyarakatan sulit untuk diselenggarakan karena sering terjadi kekacauan akibat tindak kriminalitas tersebut. Kondisi di lingkungan masyarakat juga menjadi tidak nyaman serta penuh dengan kekhawatiran akan terjadinya tindak kriminalitas tersebut.

Kemiskinan dalam lingkungan bangsa dan negara berdampak pada rendahnya tingkat kemajuan suatu bangsa. Salah satu indikator kemajuan bangsa dilihat dari rakyatnya yang telah mendapatkan kesejahteraan. Masyarakat yang sejahtera ditandai dengan terpenuhinya segala kebutuhan kehidupan dan mendapatkan penghidupan yang layak. Kemajuan suatu bangsa tidak dapat tercapai bilamana rakyatnya masih merasakan kesusahan dalam hidupnya seperti kelaparan, kedinginan dan kepanasan karena tidak memiliki hunian yang layak, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemajuan suatu bangsa dapat dipastikan terlebih dahulu bahwa masyarakat sebagai penggerak kemajuan bangsa sudah mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak.

Permasalahan yang ada di negara Indonesia termasuk masalah kemiskinan dapat dicegah/diminimalisasi dengan adanya penerapan nilai-nilai pancasila. Pancasila merupakan sebuah ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam segala bidang kehidupan (Ratri & Najicha, 2022). Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, tentunya pancasila dijadikan pedoman dan norma dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Urusan pemerintahan pun pasti akan mengacu pada pancasila seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Pancasila dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada di dalam kelima sila pancasila harus diimplementasikan dan dilaksanakan sepenuhnya guna mencapai kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang maju dan sejahtera.

Berbagai kasus kemiskinan tersebut dapat diatasi dengan aktualisasi sila pancasila kelima. Sila ini berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Menurut Sari & Najicha (2022), keadilan sosial bermakna bahwa keadilan yang ada di negara Indonesia harus diterapkan secara menyeluruh, berlaku dalam kehidupan masyarakat, dan bersifat menyeluruh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bermakna bahwa setiap individu berhak mendapatkan penghidupan yang layak dalam berbagai bidang kehidupan.

Nilai pancasila sila kelima ini berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Tentunya, implementasi dalam sila kelima pancasila ini apabila benar-benar dijalankan dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat akan mengurangi kasus kemiskinan yang ada di Indonesia. Keadilan dalam masyarakat tidak bisa menjadi diskriminasi atau pilihan karena keadilan adalah hak yang harus diterima seluruh masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan (Ambarningrum & Najicha, 2022).

Implementasi sila kelima pancasila ini lebih ditekankan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi rakyat Indonesia telah menunjukkan kepada kita bahwa dalam kehidupan bangsa dan negara, seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan dalam segala bidang, mulai dari pendidikan, kesejahteraan, keadilan di mata hukum, dan lain sebagainya (Gunawan & Najicha, 2022). Pemerintah perlu memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia agar tercipta kehidupan yang aman dan damai. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya mengentaskan masalah kemiskinan yaitu dengan mengimplementasikan nilai yang terkandung sila kelima pancasila.

Hubungan antara kemiskinan dan sila kelima pancasila adalah berkaitan dengan keadilan dalam masyarakat. Sila kelima pancasila mengamanatkan bahwa keadilan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya keadilan dalam bidang pendidikan saja, melainkan keadilan dalam berbagai segi kehidupan. Termasuk di dalamnya keadilan dalam kesejahteraan masyarakat. Seluruh masyarakat Indonesia harus merasakan kesejahteraan. Salah satu indikator masyarakat suatu bangsa sudah merasakan sejahtera yakni dengan tidak adanya lagi kasus kemiskinan. Jadi, hubungan kemiskinan dengan sila kelima pancasila yaitu dengan adanya kasus kemiskinan yang masih terjadi di Indonesia, berarti menunjukkan nilai yang terkandung di dalam sila kelima pancasila belum dapat diimplementasikan dengan baik.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2018-2019 (ribu jiwa)

No.	Propinsi	2018	2019
1.	DKI Jakarta	372.26	362.30
2.	Banten	668.74	641.42
3.	Jawa Barat	3.539.40	3.375.89
4.	Jawa Tengah	3.867.42	3.679.40
5.	Jawa Timur	4.292.15	4.056.00
6.	Yogyakarta	450.25	440.89

Sumber: BPS, 2019

Berdasarkan tabel 1, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 jumlah penduduk Indonesia yang berada di garis kemiskinan ternyata masih banyak. Propinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak adalah Propinsi Jawa Timur dengan jumlah 4.292.15 (ribu jiwa). Kemudian, disusul dengan Propinsi Jawa Tengah dengan jumlah 3.867.42 (ribu jiwa). Angka tersebut menunjukkan bahwa di wilayah negara Indonesia tingkat kesejahteraannya masih belum maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dengan cara menerapkan segala bentuk upaya yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, teruma nilai yang terkandung dalam sila kelima pancasila.

Contoh bentuk aktualisasi nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu pemberian bantuan sosial yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu contoh bantuan sosial yang diberikan terhadap masyarakat yaitu bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan dari adanya pemberian PKH terhadap masyarakat adalah membantu masyarakat yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup (Faulana et al., 2021). Program ini sudah berjalan kurang lebih 15 tahun, yakni sejak kurang lebih tahun 2007 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemberian PKH ini tentunya harus melalui serangkaian tahapan, mulai dari survei terhadap kondisi rumah, pendapatan keluarga, dan lain sebagainya. PKH ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang kekurangan dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadikan masyarakat berada dalam kedudukan setara dengan yang lainnya, tidak berada di strata yang paling rendah.

Bentuk aktualisasi yang kedua yaitu program bedah rumah. Pembangunan tempat tinggal adalah salah satu komponen dalam kesejahteraan manusia (Ginanjari, 2019). Program bedah rumah bertujuan untuk memperbaiki lingkungan tempat tinggal masyarakat yang masih tergolong kurang/tilak layak untuk dihuni. Diharapkan program ini mampu mengatasi masalah kemiskinan akibat lingkungan tempat tinggal yang kurang memadai. Aktualisasi nilai sila kelima pancasila dalam hal ini sangat terlihat dengan dibutkannya kesadaran pemerintah dalam pemerataan kondisi lingkungan tempat tinggal serta upaya yang bertujuan untuk mengentaskan kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat.

Selain Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bedah rumah, pemerintah juga memberikan sejumlah kebijakan terkait dengan kesejahteraan masyarakat, yaitu pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar di lingkungan sekolah (Fitri, 2020). Bantuan BOS ini akan dapat membantu lingkungan pendidikan dalam mengembangkan berbagai fasilitas pendidikan guna memperlancar serta mendukung pelajar dalam

berprestasi. Salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD tahun 1945 salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui program pemberian dana BOS ini, diharapkan tidak ada lagi kendala dalam kegiatan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan fasilitas penunjang belajar di sekolah.

Berbagai upaya di atas merupakan bentuk pengamalan sila kelima pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan tersebut berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, sesungguhnya berbagai permasalahan yang ada di Indonesia sumber penyelesaiannya adalah sila-sila pancasila. Nilai-nilai pancasila yang tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh akan berdampak pada berbagai lingkungan kehidupan dalam lingkup bangsa dan negara. Permasalahan yang ditimbulkan akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai pancasila dapat merugikan diri sendiri, masyarakat, bahkan kehidupan bangsa dan negara Indonesia (Rizkullah & Najicha, 2022). Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada pada kelima sila pancasila harus dijalankan dengan baik agar tidak menimbulkan permasalahan bagi lingkungan masyarakat maupun bangsa dan negara Indonesia.

Simpulan

Kehidupan suatu bangsa sangat berkaitan dengan adanya kasus kemiskinan. Negara berkembang, termasuk Indonesia pasti pernah mengalami kasus kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang hampir semua negara di belahan dunia pernah mengalaminya. Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pasti terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan, salah satu contohnya adalah kemiskinan. Kasus kemiskinan dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor penyebab kemiskinan tersebut di antaranya yaitu perbedaan kualitas sumber daya manusia yang ada, perbedaan akses terhadap berbagai fasilitas kehidupan, adanya bencana seperti wabah penyakit, bencana alam, dan sebagainya.

Faktor lain penyebab kemiskinan seperti kurangnya perhatian pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada di pelosok (pinggiran perkotaan). Masalah kemiskinan tentunya akan berdampak pada kehidupan masyarakat seperti kasus kelaparan dan kekurangan gizi, meningkatnya tindak kriminalitas, dan rendahnya tingkat kemajuan suatu bangsa atau sulitnya suatu bangsa untuk mengalami kemajuan. Namun, berbagai masalah kemiskinan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan serta mengimplementasikan nilai-nilai yang ada pada sila-sila pancasila, khususnya sila kelima pancasila. Hal tersebut karena nilai sila kelima pancasila sangat berhubungan dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Terima kasih penulis haturkan kepada dosen mata kuliah pancasila Ibu Fatma Ulfatun Najicha yang telah membimbing penulis dalam penulisan artikel ini. Tidak lupa, penulis sampaikan terima kasih kepada orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu guna memenuhi tugas UAS mata kuliah pancasila. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah berkontribusi dalam memberikan ide-ide dan saran yang membantu penulis dalam penulisan karya ini. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada para ahli yang telah menulis dan menciptakan berbagai artikel/jurnal. Berkat karya yang dituliskan, penulis dapat mempunyai ide dan gambaran serta bahan referensi dalam penulisan artikel ini.

Referensi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2018. Indeks Risiko Bencana Indonesia. Jakarta.

Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 47-56.

- Christianto, T. (2013). Volume VII, No. 2, Desember 2013 ISSN: 1978-3612. *Determinan dan karakteristik kemiskinan di provinsi Riau, VII (2)*.
- Darubekti, N. (2021, November). Kelaparan Tersembunyi pada Lansia di Pedesaan: Penyebab, Konsekuensi, dan Solusi. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ* (Vol. 1, No. 1).
- Desinta, D., & Sitorus, J. R. (2021, November). Pengaruh Kejadian Bencana Alam dan Sosial Demografi Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2017-2020. In *Seminar Nasional Official Statistics* (Vol. 2021, No. 1, pp. 383-392).
- Dulkiah, M. (2018). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Kota Bandung. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 36-57.
- Faulana, I., Murniawaty, I., & Rusdarti, R. (2021). Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Kebijakan PKH di Jawa Tengah. *Oikos: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 1-13.
- Fitri, A. (2020). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 33-39.
- Fitriani, F., Melamba, B., Khabiirun, K., & Suddin, S. (2022). KRIMINALITAS DAN DAMPAKNYA DI KOTA RAHA KABUPATEN MUNA: STUDI KASUS KECAMATAN KATOBU DAN BATALAIWORU (1998-2020). *Journal Idea of History*, 5(1), 44-51.
- Gewab, H. C., Malik, A., & Karongkong, H. H. (2015). ANALISIS KEBUTUHAN DAN SEBARAN FASILITAS PENDIDIKAN TINGKAT SMP DAN SMA DI KABUPATEN TAMBRAUW, PROPINSI PAPUA BARAT. *Spasial*, 2(3), 43-52.
- Ginangjar, A. (2019). Analisis dalam Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah di Kota Tangerang. *Journal of Government and Civil Society*, 3(2), 129-138.
- Gunawan, R. Z., & Najicha, F. U. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Moral Pelajar di Era Modern. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 422-427.
- Itang, I. (2015). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. *Tazkiya*, 16(01), 1-30.
- Maulida, Y., & Sari, L. (2015). *Analisis kualitas sumber daya manusia dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Pelalawan* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184.
- Purnamasari, H. R. (2016). Market Orientation: Urgensi Dan Peranannya Dalam Meningkatkan Performance Ukm (Usaha Kecil Menengah) Di Indonesia. *Arthavidya*.
- Ratri, E. P., & Najicha, F. U. (2022). Urgensi Pancasila Dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme Pada Generasi Muda Di Era Globalisasi. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 25-33.
- Retno, E. K. (2013). Pengaruh pendidikan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3).
- Rizqullah, T. M., & Najicha, F. U. (2022). PEGIMPLEMENTASIAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2630-2633.
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara dalam Kehidupan Masyarakat. *Harmony: Jurnal pembelajaran IPS dan PKN*, 27(5), 53-58.
- Sugihartono, T. (2018). Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, 7(1), 52-56.
- Setyadi, S., & Indriyani, L. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Peningkatan Resiko Kemiskinan Di Indonesia. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 53-66.
- Statistik, B. R. (2018). Profil Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah September 2018. BPS Provinsi Jawa Tengah 2018.
- Tri Ambarningrum, N. H., & Najicha, F. U. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 2624-2629.